

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 April 2021/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANWAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 803203

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/260 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/312 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 17500 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 7.500.000

1. MOTOR, HONDA R Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA WIN 100 Tahun 2002, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 258.670.887

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.416.170.887

**III. HUTANG**

Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.416.170.887

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.